

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Ukraina memiliki sejarah ekonomi yang tidak stabil. Pada tahun 1991, Ukraina adalah salah satu negara pecahan Uni Soviet termiskin (Sutela, 2012). Ekonomi Ukraina tidak dapat berkembang cepat sejak kemerdekaan. Pada tahun 1992, Ukraina dan Polandia memiliki statistik ekonomi yang hampir sama tetapi tahun 2014 Polandia berada diatas Ukraina dengan pendapatan dua kali lebih besar (BBC News, 2014). Dari tahun 1990 hingga 1994, Produk Domestik Bruto (PDB) Ukraina terus mengalami penurunan setengahnya dan ekonomi mengalami kontraksi setiap tahun antara 9,7 pada 1991 dan 22,7 di 1996 (Sutela, 2012). Ukraina juga memiliki catatan hitam dalam Internaional Monetary Fund (IMF) yakni gagal memenuhi dan mempertahankan persyaratan bantuan di tahun 2008 dan 2010. Permasalahan ekonomi Ukraina terus berlanjut hingga Viktor Yanukovych menjabat sebagai presiden pada 2010. BBC News (2014) menyatakan bahwa IMF memperkirakan ekonomi Ukraina menyusut 0,3 persen di tahun 2013. Kondisi tahun itu tidak berkembang dari tahun sebelumnya, 2012. Hal tersebut berarti bahwa ekonomi Ukraina tidak mengalami peningkatan sepanjang dua tahun berturut.

Terpilihnya Yanukovych sebagai presiden Ukraina di tahun 2010, dihadapkan pada beberapa tantangan yakni menciptakan stabilitas ekonomi, memperbaiki tata pemerintahan, memperkuat supremasi hukum dan memastikan tidak ada ancaman terhadap institusi serta demokrasi (Paul, 2012). Instabilitas ekonomi dan tingginya angka korupsi di elit pemerintah menjadi permasalahan utama yang perlu diselesaikan oleh Yanukovych. Jika pemerintah ingin memajukan negara maka pemerintah perlu mendorong persaingan ekonomi dan menindak tegas praktik korupsi (Sutela, 2012). Tingkat korupsi yang tinggi menghalangi transisi Ukraina ke pasar bebas. Pada tahun 2013, Ukraina berada di peringkat 144 dari 177 dalam Transparency International's Corruption Perceptions Index (BBC News, 2014). Krisis politik membawa kembali masalah lama Ukraina dan konsekuensinya

berdampak pada sektor ekonomi (Walker, 2014). Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan Pekka Sutela (2012) yakni ketidakstabilan politik menghambat pembangunan institusi administrasi fungsional seperti pajak, dan menciptakan *shadow economy*.

Pertengahan tahun 2012, ekonomi Ukraina mengalami penurunan dalam beberapa aspek diantaranya rendahnya PDB negara yang berkelanjutan, produksi industri, penurunan ekspor, penurunan investasi dan permintaan domestik. Di waktu yang sama, Ukraina juga memiliki tenggat waktu untuk membayar utang luar negeri sebesar 10 miliar US dolar pada tahun 2013 dan 8 miliar US dolar di tahun 2014 yang berdampak pada penurunan cadangan devisa negara (Kononczuk, 2013). Adanya tuntutan untuk membayar utang luar negeri dari pihak luar seperti IMF, membuat pemerintahan era Yanukovich berada dalam tekanan agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Yanukovich dinilai tidak dapat memperbaiki situasi buruk ekonomi dan mengatasi tingginya angka korupsi. Hal itu membuat Ukraina terus berada dalam instabilitas ekonomi.

Untuk mengatasi situasi ekonomi Ukraina yang genting, Yanukovich dihadapkan pada beberapa pilihan diantaranya menjalin kerjasama dengan Uni Eropa (UE) dalam Association Agreement (AA) atau kerjasama ekonomi dengan Rusia. UE dan Rusia, kedua menawarkan kerjasama ekonomi terhadap pemerintah Ukraina sebagai bentuk bantuan untuk menstabilkan ekonomi negara. Olga Shumylo-Tapiola (2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga pilihan yang mungkin diambil Yanukovich untuk mengatasi situasi genting ekonomi Ukraina. Pertama, tetap mengandalkan usaha internal sendiri dengan mempertahankan ekonomi yang relatif tertutup, dikendalikan oleh sekelompok kecil pengusaha, sedikit persaingan dan keterbatasan. Kedua, menandatangani AA dengan UE yang mencakup perdagangan bebas dan komperhensif dalam Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Ketiga, bergabung dalam Customs Union yang dipimpin langsung oleh Rusia dengan beranggotakan Belarusia, dan Kazakhstan.

Ukraina memulai negosiasi mengenai AA pada Maret 2007 sebelum era Yanukovich yakni pada masa Viktor Andriyovych Yushchenko (Pastore, 2014).

Namun, negosiasi tentang AA di era Yushchenko belum mencapai kesepakatan. Maka dari itu, Yanukovych perlu melanjutkan kerjasama yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Dijelaskan dalam situs resmi pemerintahan Ukraina bahwa kesimpulan dari negosiasi AA antara UE – Ukraina telah diumumkan ketika KTT 19 Desember 2011. Kesimpulan tersebut mengenai komitmen antara UE – Ukraina untuk menandatangani AA pada KTT Eastern Partnership selanjutnya di Vilnius. Kesimpulan tersebut mencakup kesiapan pemerintah Ukraina dalam memenuhi persyaratan seperti reformasi demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia. AA UE – Ukraina memiliki cakupan yang lebih luas daripada kerjasama ekonomi serupa yang dibuat UE dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur lainnya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kerjasama AA telah dibangun sejak lama sebelum pemerintahan Yanukovych, yang berarti kesepakatan final secara resmi AA ditandatangani di era Yanukovych.

Kerjasama AA dengan UE terfokus pada DCFTA yang diharapkan dapat berkontribusi dalam modernisasi ekonomi dan mengintegrasikan pasar Ukraina ke pasar UE, terutama mengadopsi akuisisi UE terkait perdagangan bebas (Spiliopoulos, 2014). Dalam Official Journal of the European Union (2014) dijelaskan enam tujuan AA pada Artikel 1, beberapa diantaranya, pertama, memperkuat kembali hubungan secara bertahap antara semua pihak terlibat yang didasarkan pada nilai-nilai umum serta hubungan dekat, dan mengintegrasikan Ukraina dengan kebijakan UE dalam program kelembagaan. Kedua, menyediakan kerangka kerja yang tepat melalui dialog politik. Ketiga, meningkatkan integrasi ekonomi bertahap Ukraina di pasar UE dalam DCFTA seperti yang diatur dalam Title IV, dan untuk membantu menyempurnakan transisi Ukraina ke ekonomi pasar bebas.

Pada 2010, Yanukovych berjanji untuk menjalin hubungan baik dengan UE (Paul, 2012). Pada KTT UE – Ukraina 25 Februari 2013, Yanukovych menyatakan bahwa AA tetap menjadi prioritas bagi Ukraina. Kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk menandatangani AA pada 21 November 2013. Tanggal 18 September 2013, pemerintah Ukraina menyetujui secara resmi

rancangan AA. Perdana Menteri Ukraina, Azarov, menjelaskan bahwa AA akan menjadi langkah yang bersejarah (Pastore, 2014). Namun, pada 21 November 2013 saat KTT Eastern Partnership di Vilnius, Yanukovych memutuskan untuk membatalkan penandatanganan AA (Kononczuk, 2013). Keputusan membatalkan penandatanganan tersebut sangat tidak terduga. Yanukovych membatalkan penandatanganan AA di waktu yang begitu cepat. Pada 26 November 2013, Yanukovych menyebut kesepakatan AA dengan UE menghadapi jalan buntu dan tidak dapat dilanjutkan (Kononczuk, 2013).

Diketahui bahwa, sebelum Yanukovych membatalkan penandatanganan AA di Vilnius. Ia sempat diundang ke kediaman Vladimir Putin, presiden Rusia, di luar Moskow pada 4 Maret 2013 untuk membahas Customs Union. Tanggal 31 Mei 2013, Ukraina menyetujui nota pendalaman Customs Union dengan Rusia (Pastore, 2014). Ukraina meyakini bahwa keanggotaannya dalam Customs Union dapat membawa kebutuhan gas dari Rusia dengan harga murah. Selain itu, Rusia juga akan memberikan dana pinjaman ke Ukraina. Meskipun merupakan pasar penting satu sama lain, Ukraina dan Rusia belum berhasil menjalin ikatan ekonomi dan perdagangan kelembagaan yang kuat (Shumylo-Tapiola, 2012). Kedua negara memiliki catatan kerjasama buruk yakni sempat menjalani perang gas di tahun 2006 dan 2009 (Shumylo-Tapiola, 2012). Hubungan Rusia dan Ukraina di era Viktor Yushchenko menjadi lebih netral dan Rusia tampak kehilangan minat terhadap Ukraina. Namun, terpilihnya Yanukovych pada Februari 2010 membawa kembali minat Rusia dalam hal integrasi kawasan (Shumylo-Tapiola, 2012).

Yanukovych memikul tanggung jawab penuh atas pembatalan penandatanganan AA yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Ukraina (Pastore, 2014). Perjanjian yang telah dinegosiasikan sejak 2007 dibatalkan secara sepihak oleh Ukraina. Dibawah kepemimpinan Yanukovych, hubungan Ukraina dan UE secara substansial memburuk (Pastore, 2014). Kenyataan ini tidak sejalan dengan apa yang ia sampaikan saat kampanye 2010 lalu tentang menjaga hubungan baik dengan UE. Yanukovych memiliki wewenang dan kekuatan besar dalam

membentuk kebijakan luar negeri Ukraina. Ia memegang semua kendali institusi negara termasuk Verkhovna Rada. Pastore (2014) menyatakan bahwa keputusan kerjasama AA antara UE – Ukraina berada di tangan Yanukovych sendiri. Ia dapat memutuskan kebijakan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada institusi atau badan pemerintahan lainnya.

Pembatalan penandatanganan AA tersebut menuai protes dari sebagian besar masyarakat Ukraina. Pada 24 November 2013, demonstrasi memuncak di kota-kota besar Ukraina. Sebanyak 150.000 demonstran, termasuk demonstran terbesar berada di Kyiv yang dihadiri oleh 80.000 hingga 100.000 orang pemrotes (Kononczuk, 2013). Jumlah demonstran tersebut semakin bertambah setiap bulannya. Protes oleh pro-UE itu dikenal sebagai Revolusi Maidan yang berakhir dengan melarikan diri Yanukovych pada Februari 2014 (The Economist, 2015). Protes tersebut adalah bentuk demonstrasi terbesar sejak Orange Revolution atau Revolusi Oranye yang memakan banyak korban jiwa. Berdasarkan angka statistik perhitungan GfK (dalam, Kononczuk, 2013) sebagian masyarakat Ukraina mendukung kesepakatan penandatanganan AA. Dinyatakan bahwa per November 2013 terhitung sebanyak 45 persen masyarakat Ukraina memilih dekat dengan UE, sedangkan hanya 14 persen setuju bergabung dalam Customs Union.

Kebijakan pembatalan penandatanganan AA oleh Yanukovych dan lebih memilih bergabung dengan Rusia dalam Customs Union dinilai dapat memperburuk kondisi negara. Bentuk protes yang sangat besar adalah satu bukti bahwa keputusan Yanukovych tidak memberikan dampak baik bagi Ukraina. Dilihat berdasarkan rekam jejak hubungan antara Ukraina – UE dan Ukraina – Rusia, pada tahun 2000 EU menjadi mitra dagang besar dalam hal pasar dengan membeli sepertiga ekspor Ukraina, sedangkan Rusia membeli kurang dari seperempat ekspor (Sutela, 2012). EU telah menjadi mitra dagang penting bagi Ukraina (Spilipoulos, 2014). Ekspor dan FDI dari negara-negara anggota UE meningkat antara tahun 1999 dan 2008. Keputusan kontroversial itu pada akhirnya merugikan Yanukovych sebagai presiden yang digulingkan dari jabatannya.

Keputusan Yanukovych menimbulkan pertanyaan besar. Kerjasama yang telah dinegosiasikan sejak lama dan dirancang dari tahun 2007, dibatalkan di waktu tidak terduga. Hal tersebut mengecewakan banyak pihak khususnya masyarakat Ukraina yang berharap banyak terhadap UE. Kerjasama dengan UE dinilai dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan juga permasalahan politik domestik Ukraina. Pembatalan AA antara EU – Ukraina sepenuhnya adalah tanggungjawab Yanukovych sendiri (Pastore, 2012). Ia lebih memilih bergabung dengan Rusia dalam Customs Union daripada AA dengan UE. Diketahui bahwa Ukraina memiliki catatan hubungan yang lebih baik dengan UE daripada Rusia dalam bidang perdagangan dan ekspor. Begitupula dukungan yang ada didalam internal negara mayoritas memilih dekat dengan UE dibanding Rusia. Namun, sejak Yanukovych menjabat sebagai presiden kedekatan Ukraina dengan UE mulai berkurang. Oleh karena itu, keputusan Yanukovych membatalkan penandatanganan AA menjadi sebuah pertanyaan. Penelitian ini akan mencari jawaban mengapa Yanukovych membatalkan penandatanganan AA di Vilnius pada 21 November 2013 dan kemudian lebih memilih bekerjasama dengan Rusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, mengapa Viktor Yanukovych membatalkan penandatanganan AA dengan UE dan lebih memilih Rusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansi *leader's worldview* dalam memutuskan kebijakan luar negeri, memahami cara pandang Yanukovych sebagai pembuat kebijakan yang berorientasi pada Rusia. Pandangan dunia atau *worldview* digunakan untuk menjelaskan landasan atau alasan Yanukovych berpaling dari kerjasama AA dengan UE ke Rusia.

1.4 Kerangka Teori

Untuk memahami sikap Yanukovych dalam membatalkan kerjasama dengan UE dan lebih memilih Rusia, maka peneliti menggunakan kerangka teori *worldview*. Dalam kerangka teori ini, dipaparkan pengertian dasar, faktor-faktor yang

mempengaruhi cara pandang seorang pemimpin dan pengaruh *worldview* terhadap kebijakan luar negeri.

1.4.1 *Worldview*

Worldview adalah interpretasi tentang dunia. Istilah ini memiliki sejarah panjang yang dapat ditarik kembali pada Kant tentang filsafat (Vidal, 2008) dalam tulisannya yang berjudul *Critique of Judgment* (Hiebert, 2002). *Worldview* atau pandangan dunia juga dapat ditelusuri ke James, seorang Prebiterian Skotlandia (Naugle, 2002). James W Sire (2004) menjelaskan bahwa istilah *worldview* adalah terjemahan dari bahasa Jerman “*Weltanschauung*” dan pertama kali digunakan oleh Immanuel Kant pada 1724 hingga 1804. Dalam Idealisme Jerman, istilah *worldview* digunakan secara luas untuk menunjukkan seperangkat kepercayaan yang mendasari pemikiran serta tindakan manusia. *Worldview* telah digunakan dalam berbagai konteks yang telah diadaptasikan, mulai dari idealisme Jerman hingga Nihilisme dan menjadi Ke-Kristenan Calvinistik (Sire, 2004). *Worldview* adalah perspektif mendasar dari individu untuk mengatasi setiap permasalahan sosial atau politik.

Worldview adalah seperangkat asumsi dan keyakinan tentang sifat realitas (Reason, 1998). Asumsi memberi dasar epistemik dan ontologi kedalam sistem keyakinan. Overton (1991 dalam Koltko-Rivera, 2004) menyatakan *worldview* sebagai seperangkat asumsi yang berhubungan dengan realitas. John Valk et al (2011) menjelaskan bahwa butuh banyak interpretasi untuk membentuk *worldview*, sehingga menciptakan sebuah keyakinan dalam diri individu. Keyakinan individu tentang aspek fundamental realitas membentuk dan mempengaruhi persepsi, pemikiran, pengetahuan, serta tindakan mereka (Abdullah & Nadvi, 2011 dalam Sartini, 2017). Maka dari itu, Philips dan Brown (1991, dalam Griffiths, 2007) mendefinisikan *worldview* sebagai *a view of the world* dan *a view for the world*. Singkatnya, *worldview* adalah seperangkat asumsi dan keyakinan tentang sifat realitas yang membentuk sikap individu.

Penerapan *worldview* dapat diperoleh melalui penilaian tentang kondisi sekitar yang membentuk jalanya hubungan internasional (Griffiths, 2007). *Worldview*

adalah bagian penting dari kehidupan manusia karena menjelaskan cara individu bersikap (Sartini, 2017). *Worldview* adalah orientasi pilihan yang diekspresikan kedalam serangkaian praduga tentang konstitusi dasar realitas sebagai landasan hidup (Sire, 2004). Menurut Martin Griffiths (2007) terdapat dua dimensi *worldview*. Pertama ontologi, *worldview* mengandung asumsi dan praduga mendasar tentang sifat konstruktif hubungan internasional. Asumsi dan keyakinan atau *belief*, adalah hal yang paling mendasar tentang sifat realitas dalam domain hubungan internasional. Kedua evaluatif, yaitu memberi dasar untuk menilai dan menentukan prinsip yang berhubungan dengan parameter hubungan internasional. Sederhananya, ontologi adalah cara untuk memahamai kondisi sedangkan evaluatif untuk membentuk respon atas pemahaman suatu kondisi. Dilthey (dalam Sire, 2004) menjelaskan *worldview* sebagai seperangkat kategori mental dalam diri seseorang untuk memahami dan merespon terhadap apa yang mereka rasakan tentang dunia di sekitarnya dan teka-teki yang dihadapkannya. Ketika suatu peristiwa terjadi, *individual worldview* cenderung menafsirkan peristiwa tersebut dengan harapan yang diinginkan (Voss & Dorsey, 1992 dalam Mowle, 2003). Oleh karena itu, *worldview* adalah instrument untuk menggambarkan, menjelaskan, serta mengevaluasi sesuatu yang menarik (Gunnel, 1987, dalam Griffiths, 2007).

Meskipun konsep *worldview* sering digunakan dalam berbagai disiplin akademik, Sheikh (2018) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan utama *worldview*. Pertama, mengadaptasikan *worldview* dalam *cognitive framework*. Seseorang cenderung mengembangkan pandangan dunia sebagai struktur kognitif yang mereka terapkan untuk memahami dunia. Dalam pendekatan *cognitive, worldview analysis* digunakan untuk memahami berbagai macam perilaku, mengantisipasi dan membentuk sikap atas suatu perilaku. Pendekatan kognitif diadopsi langsung dari definisi *worldview* menurut Immanuel Kant. Kant menjelaskan *cognitive framework* dapat membentuk persepsi dan memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dunia di sekitarnya (Hiebert, 2008 dalam Sheikh, 2018). Di pendekatan ini, *worldview* relevan sebagai *human ability* untuk menciptakan *order, meaning*, dan *value* dalam memahami situasi dunia.

Pendekatan *worldview* kedua adalah *sociopolitical consequences* (Sheikh, 2018). Pendekatan ini memiliki pengertian yaitu pengembangan dari berbagai asumsi tentang realitas sosial dan sering digunakan oleh *social constructivists*. Dalam *sociopolitical consequences*, *worldview* relevan sebagai *narratives* yang dipahami dari lingkungan seseorang berada. *Narrative* mengidentifikasi musuh, dan menghubungkannya dengan tujuan atau kepentingan (Edward, 2014 dalam Sheikh, 2018). Pendekatan *sociopolitical consequences* lebih melihat bagaimana *worldview* mempengaruhi, membentuk dan menjelaskan perilaku, proses, serta hasil. Dalam pendekatan konstruktivis sosial ini, *worldview* sering dibagi menjadi dua model analisis yaitu mendefinisikan *what is* dan mendefinisikan *what ought to be* (Johnson et al, 2011, dalam Sheikh, 2018). Dari dua model analisis tersebut kemudian menjadikan *worldview* sebagai *ontological* dan *normative*.

1.4.2 *Worldview* Pada Pemimpin dan Kebijakan Luar Negeri

Worldview penting bagi seorang pemimpin atau pembuat kebijakan untuk memahami dinamika hubungan internasional. Michel Foucault (dalam Sire, 2004) menjelaskan hubungan antara *worldview* dan kekuasaan atau pemimpin. Ia menyatakan dalam istilah Foucaultian skeptis *worldview* hanya sebagai konstruksi linguistik dari elit kekuasaan, atau dengan kata lain, *worldview* hanyalah interpretasi semu dari realitas yang mengenakan kekuatan linguistik. *Worldview* terbentuk dari pemahaman atas realitas yang kemudian membentuk keyakinan kausal tentang hubungan internasional sehingga keyakinan tersebut menjadi petunjuk bagi seorang pemimpin untuk menentukan sikap. Keyakinan kausal diperoleh melalui evaluasi nilai-nilai sehingga membentuk asumsi. Pemimpin memahami dinamika hubungan internasional dan mempersepsikan kendala berdasarkan asumsi serta keyakinan mereka (Neack, 2008).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *leader's worldview*. Valk et al (2011) menyatakan *worldview* dapat dipengaruhi dari tempat bersosial atau lingkungan dimana mereka berada. Nietzsche (dalam Sire, 2004) percaya bahwa *worldview* adalah entitas budaya orang-orang yang berada di lokasi geografis tertentu. Poin yang dapat ditarik dari pendapat diatas yakni berkaitan dengan

lingkungan. Lingkungan dalam hal ini memiliki arti bukan hanya tentang geografis tetapi termasuk lingkungan politik di sekitarnya. Holm dan Bjorkuis (dalam Kolto-Rivera, 2004) menjelaskan bahwa salah satu faktor penting *personality worldview* muncul dari *political event*.

Politik adalah faktor penting dalam membentuk *leader's worldview* (Smith, 2003, dalam Valk et al, 2011). Politik dalam hal ini memiliki arti baik politik internasional atau *political nature*. Jerrold Post (2007) menjelaskan, pertama *worldview* adalah persepsi realitas politik. Kedua sebagai keyakinan, termasuk konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Ketiga, *worldview* sebagai filosofi politik, ideologi, tujuan dan pandangan kebijakan. Keempat, pandangan dunia berhubungan dengan nasionalisme dan identifikasinya dengan negara. *Worldview* adalah persepsi politik yang dapat mempengaruhi individu lain. Leontiev (2007) menyatakan *worldview* memiliki aspek fungsi yang berkaitan dengan persepsi politik untuk membentuk keputusan. Terdapat dua pengaruh taktik yang diadopsi pembuat kebijakan menurut Mowle (2003) yaitu diwarnai oleh asumsi psikologis dan politik. Dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain mengenai pertama, menentukan strategi paling efektif untuk memunculkan respon yang diinginkan negara lain. Kedua merespon tanpa mempertimbangkan keinginan dari pihak lain.

Pengaruh politik internasional terhadap *leader's worldview* diperoleh melalui sosialisasi dengan pembuat kebijakan lain. Politik internasional mengandung berbagai macam asumsi tentang dunia, dan bagaimana aktor hubungan internasional harus bersikap. Maka dari itu, *worldview* tidak muncul secara acak dari pengalaman masing-masing individu tetapi diperoleh melalui interaksi dengan pihak lain. *Worldview analysis* memerlukan perhatian terperinci pada pola konstruksi dan proses negosiasi (Childester, 1989). *Worldview* adalah sebuah proses konstelasi perubahan negosiasi strategis. Negosiasi kekuasaan melibatkan klaim pada simbolis, praktik, dan bentuk asosiasi yang kemudian membentuk *worldview* (Childester, 1989). Pandangan seorang pemimpin muncul dari kondisi yang mereka hadapi. Pemimpin memiliki asumsi tentang sikap aktor lain terhadap mereka, sehingga memunculkan respon politik luar negeri. Respon dapat

berbentuk ideologi, tindakan, atau kerjasama. Pembuat kebijakan biasanya bertindak berdasarkan keyakinan yang sejalan dengan kondisi. Keyakinan dapat muncul melalui interaksi dengan pihak lain.

Worldview berperan penting bagi pemimpin untuk menentukan kebijakan luar negeri. Perilaku negara tidak reflektif, melainkan mengalir dari kebijakan luar negeri dan cara pemimpin memandang situasi hubungan internasional. Pemimpin memiliki penilaian sendiri untuk membuat kebijakan luar negeri yang mempengaruhi negara mereka (George, 1993 dalam Mowle, 2003). Kebijakan luar negeri adalah produk pemimpin atau pemerintah (Waltz, 1996). Kebijakan luar negeri tidak memiliki definisi paten. Para ahli memiliki perbedaan mengenai definisi kebijakan luar negeri. Namun secara umum, kebijakan luar negeri dipahami sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasional. Sama halnya dengan kebijakan luar negeri, kepentingan nasional memiliki definisi berbeda-beda menurut beberapa ahli. Nuechterlein (1976) mengartikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lain. Dalam hal ini, pemimpin memiliki cara pandang sendiri untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Peran *worldview* dalam kebijakan luar negeri berada pada pembuat kebijakan dan *foreign policy decision making*. *Worldview* yang mengandung keyakinan memberi petunjuk bagi seorang pemimpin untuk membuat keputusan. Alexander George (1969 dalam Larson, 1994) menjelaskan bahwa keyakinan seorang pemimpin memberikan peran besar dalam *foreign policy decision making*. Pemimpin biasanya membuat kebijakan luar negeri berdasarkan keyakinan mereka. Yakin atas pilihan yang baik atau buruk dan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Keyakinan menjadi dasar bagi pemimpin dalam membuat kebijakan luar negeri dengan memahami situasi, penilaian serta analisis opsi, dan prediksi hasil (George 1979 dalam Larson, 1994). Faktor yang memainkan peran kuat dalam kebijakan luar negeri adalah keyakinan seorang pemimpin tentang lingkungan politik dan aktor lain. Ketika seorang pemimpin yakin bahwa aktor lain adalah baik dan menguntungkan maka pemimpin tidak segan untuk menjalin

hubungan kerjasama. Keyakinan seorang pemimpin tentang berbagai faktor situasional dan struktural dapat menyediakan informasi kemudian memberi petunjuk untuk menentukan kebijakan luar negeri. Keyakinan menjadi alat utama yang dinilai dapat mencapai tujuan politik (George, 1969 dalam Schafer dan Smith, 2017) termasuk kepentingan nasional negaranya.

Pemimpin tidak bertindak berdasarkan realitas objektif dari suatu situasi melainkan bertindak berdasarkan keyakinan mereka tentang situasi (Holsti, 1962, dalam Schafer dan Smith, 2017). Jika ditarik kembali pada definisi *worldview* sebagai asumsi dan keyakinan tentang sifat realitas, maka asumsi dan keyakinan menjadi faktor penting dalam *foreign policy decision making*. Asumsi memberi gambaran sikap aktor lain dalam hubungan internasional, sehingga membentuk kepercayaan berinteraksi satu sama lain, dan bertindak sesuai dengan keyakinan (Barber, 1993 dalam Mowle, 2003). Keohane dan Goldstein (1993, dalam Ivaylo, 2011) menyatakan bahwa keyakinan dalam *worldview* memberikan kerangka kerja yang bermakna bagi seseorang pemimpin. Oleh karena itu *worldview* memiliki pengaruh dalam *foreign policy decision making* untuk menentukan orientasi pilihan kebijakan luar negeri.

James W Sire (2004) menjelaskan bahwa *worldview* adalah orientasi pilihan dari sebuah asumsi dan keyakinan seorang pemimpin. *Worldview* memberi petunjuk bagi pemimpin untuk menentukan preferensi kebijakan luar negeri. Pemimpin membuat kebijakan luar negeri didasarkan pada asumsi dan keyakinan mereka. *Worldview* sebagai asumsi dan keyakinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, *political nature* dapat secara langsung mempengaruhi *worldview* karena sebagai tempat hidup dan bersosial. Kedua, Politik internasional dapat mempengaruhi *worldview* karena pemimpin cenderung merespon aktor internasional lain melalui kebijakan luar negeri. Adanya hubungan dekat antar aktor hubungan internasional memberi kemudahan pada proses sosialisasi yang kemudian membentuk *worldview*. Maka dari itu, *worldview* dapat menjelaskan tindakan seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan luar negeri.

1.5 Argumentasi

Berdasarkan kerangka teori diatas, penulis berargumen keputusan Yanukovych membatalkan penandatanganan AA dengan UE karena Yanukovych memandang Rusia sebagai *main partner*. Pertama, adanya keyakinan dari diri Yanukovych melihat Rusia sebagai aktor penting, dapat membentuk orientasi kebijakan luar negeri pro-Rusia. Kedua, berdasarkan sifat realitas, Rusia memiliki peran besar dalam menstabilkan ekonomi Ukraina di era Yanukovych. Ketiga, adanya pengaruh Rusia dalam membentuk Yanukovych *worldview*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 *Main Partner*

Tidak ada definisi teoritis tentang *main partner*, akan tetapi *main partner* sendiri terdiri dari dua kata yaitu *main* dan *partner*. Secara harfiah, *main* memiliki arti utama, sedangkan *partner* berarti mitra atau rekan. Maka dari itu, *main partner* dapat dipahami sebagai mitra kerja utama. Kerjasama ini berbentuk bilateral. Suatu negara menilai negara lain sebagai mitra kerja utama karena dapat mencapai tujuan atau kepentingan nasional dan memenuhi kebutuhan negara. *Main partner* adalah orientasi kerjasama, pilihan prioritas dibanding kerjasama lainnya. Dalam hal ini, *main partner* menggambarkan hubungan yang kuat dan menguntungkan. Hubungan kuat dikarenakan adanya kedekatan geografis dan adanya ketergantungan dari suatu negara terhadap aktor negara lainnya. Umumnya, negara dengan kekuatan nasional lebih kecil menjadikan negara dengan kekuatan lebih besar atau maju sebagai bentuk *survive*, sedangkan negara maju memanfaatkan negara berkembang untuk menguatkan posisi mereka sebagai *superpower*. Oleh karena itu, masing-masing negara mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Lewicki (2003) menjelaskan bahwa terdapat satu bentuk kerjasama yang memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak yaitu *win-win solution*. Bentuk kerjasama tersebut adalah strategi integratif yang menyatukan kepentingan dua aktor negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Strategi itu seringkali dilakukan melalui negosiasi dalam bentuk politik.

Dalam hal ekonomi, *main partner* dapat juga dipahami sebagai *strategic partnership*. Andrly Tyushka (2019) menyatakan bahwa selain mengenai pentingnya *state security*, *strategic partnership* juga erat kaitannya dengan *economic issue*. *Strategic partnership* menjadikan negara lain sebagai acuan utama bagi suatu negara dalam mengembangkan serta meningkatkan ekonomi negaranya. Ukraina menilai Rusia memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan seperti gas serta energi alam lainnya, dan membangun kembali ekonomi seperti ekspor serta impor. Rusia menjadi negara yang berperan besar mengembangkan ekonomi Ukraina era Yakunovych.

1.6.1.2 Keyakinan

Keyakinan adalah satu bagian dari konsep kepercayaan. Rokech dan Bilsky (dalam Koltko-Rivera, 2004) menjelaskan keyakinan dapat membentuk asumsi terhadap satu kondisi. Koltko-Rivera (2004) membagi keyakinan *worldview* dalam tiga kategori yaitu *existential beliefs*, *evaluative beliefs* dan *prescriptive and proscriptive beliefs*. Sedangkan Goldstein dan Keohane (dalam Sheikh, 2018) membagi keyakinan dalam dua kategori. Pertama, *principled beliefs* merujuk pada ide-ide yang dimiliki individu tentang baik atau buruk, dan benar atau salah. Kedua, *causal beliefs* merujuk pada rancangan atau rencana yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuannya. Goldstein dan Keohane juga menjelaskan bahwa keyakinan harus diterima sebagai kekuatan *authoritative* dari perilaku pemimpin, kelompok bahkan bangsa. Seorang pemimpin cenderung membuat kebijakan luar negeri yang mereka yakini dapat memberi keuntungan bagi mereka.

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif ialah untuk menjelaskan suatu fenomena dan mencari pemahaman melalui hubungan antar beberapa variabel. Dengan memahami variabel sebab – akibat, penulis dapat menyajikan jawaban yang diinginkan. Tipe penelitian ini akan membantu penulis untuk mencari alasan dan faktor pendorong terjadinya satu fenomena. Tipe

penelitian eksplanatif bertujuan memahami fenomena sebab – akibat (Levy, 2002) dalam membantu penulis menjawab rumusan masalah.

1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menjelaskan kondisi Ukraina era Yanukovych, pandangan Yanukovych terhadap UE dan Rusia, dan menjelaskan Yanukovych sendiri. Sedangkan jangkauan penelitian dibatasi dari tahun 2009 hingga 2013. Tahun 2009, sejak dimulainya kampanye pemilihan Presiden Ukraina dan awal kemerosotan ekonomi Ukraina era Yanukovych. Tahun 2013, yaitu titik waktu pembatalan penandatanganan AA dan berpaling ke Rusia. Namun, tidak menutup kemungkinan digunakan data di luar ruang lingkup dan jangkauan penelitian yang dapat mendukung argumentasi penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, mencari segala sumber informasi yang berkaitan serta relevan dengan pembahasan penelitian. Studi pustaka diambil dari data-data primer dan sekunder. Data primer didapat seperti melalui situs resmi Pemerintah Ukraina. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan berita baik bersifat cetak maupun elektronik, *online*, yang diakses melalui internet dengan tetap mengecek keabsahan atau kebenaran sumber.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di penelitian ini adalah kualitatif, karena fokus dalam memahami studi kasus. Metode kualitatif menekankan interpretasi penulis tentang pemahaman terkait sumber-sumber informasi yang didapat dari data-data primer dan sekunder. Metode kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 2014). Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk memahami hasil dalam kasus individu dan mengadopsi pendekatan sebab – akibat untuk menjelaskan kasus (Mahoney dan Goertz, 2006).

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argumentasi, dan metode penelitian. Bab II membahas tentang kepemimpinan Yanukovych dan lingkungan politik yakni Party of Region. Dalam bab II dijelaskan Yanukovych masa kampanye yang berjanji membangun hubungan baik dengan UE dan Rusia tetapi terlihat memiliki minat lebih terhadap Rusia daripada UE. Begitupula lingkungan politik dalam Party of Region yang menggambarkan ideologi sama dengan Yanukovych pro-Rusia. Bab III menjelaskan rendahnya kondisi ekonomi Ukraina yang mengalami penurunan PDB di tahun 2012 dan 2013. Pada bab III juga dipaparkan penjelasan tentang hubungan antara Ukraina dengan Rusia dan UE. Bab IV menjelaskan Yanukovych *worldview* dalam memandang Rusia sebagai mitra kerja utama daripada UE. Bab IV ini untuk menguji argumentasi penelitian. Bab V diisi dengan kesimpulan, alasan Yanukovych membatalkan penandatanganan AA.